

Islam pada Masa Kerajaan-Kerajaan di Nusantara: Analisis Perspektif Teori Kekuasaan Michel Foucault

Hamdan Al Masruri¹, Aditya Saputra², Sholihan³, Fathurrahman⁴, M. Qomarul Huda⁵

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Email: ¹almasrurihamdan999@gmail.com, ²aditya66saputra@gmail.com, ³ssolihana@gmail.com,

⁴arisakunsaya@gmail.com, ⁵emqohu@uinkediri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan kajian Islamisasi di Nusantara yang lebih banyak menekankan aspek perdagangan, dakwah, dan akulturasi budaya, sementara dimensi relasi kekuasaan dalam perkembangan Islam pada masa kerajaan-kerajaan Islam masih relatif kurang mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Islam pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara melalui perspektif teori kekuasaan Michel Foucault. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif-interpretatif. Sumber data diperoleh dari buku-buku sejarah Islam Nusantara, karya-karya Michel Foucault, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan konsep power/knowledge, relasi kuasa, wacana, dan disiplin sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara tidak hanya berfungsi sebagai pusat kekuasaan politik, tetapi juga sebagai produsen wacana keislaman yang membentuk pengetahuan dan identitas masyarakat. Relasi antara sultan dan ulama membentuk jaringan kekuasaan yang saling memberikan legitimasi, sedangkan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, surau, dayah, dan lembaga peradilan Islam berperan sebagai mekanisme disiplin sosial yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Sehingga Islamisasi di Nusantara merupakan proses yang melibatkan penyebaran agama sekaligus produksi pengetahuan dan pengelolaan kekuasaan melalui berbagai institusi sosial dan keagamaan.

Kata Kunci: Islam Nusantara, kerajaan Islam, Michel Foucault, kekuasaan, Islamisasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan Islam di Nusantara merupakan salah satu fenomena historis yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan identitas sosial, budaya, dan politik masyarakat Indonesia. Sejak kedatangannya melalui berbagai jalur perdagangan internasional, Islam berkembang tidak hanya sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik yang melahirkan berbagai kerajaan Islam di Nusantara, seperti Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Banten, dan Mataram Islam. Keberadaan kerajaan-kerajaan tersebut menunjukkan bahwa proses Islamisasi tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat Nusantara (Azra 2013). Kerajaan-kerajaan Islam berperan penting dalam memperluas pengaruh Islam melalui institusi politik, pendidikan, hukum, dan budaya. Para sultan tidak hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga berperan sebagai pemimpin yang memperoleh legitimasi keagamaan dari para ulama dan masyarakat. Melalui hubungan tersebut Islam

berkembang menjadi bagian integral dari struktur sosial dan politik kerajaan sehingga mampu membentuk pola kehidupan masyarakat secara luas (Ricklefs 2008).

Kajian mengenai Islam pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih banyak menitikberatkan pada aspek sejarah Islamisasi, perdagangan, dakwah, dan akulturasi budaya. Padahal perkembangan Islam dalam konteks kerajaan tidak hanya berkaitan dengan penyebaran agama, tetapi juga melibatkan mekanisme kekuasaan yang bekerja melalui institusi, wacana, dan relasi sosial. Maka diperlukan suatu pendekatan yang mampu menjelaskan bagaimana kekuasaan berperan dalam membentuk serta mempertahankan dominasi Islam dalam masyarakat kerajaan (Abdullah 1987). Perspektif teori kekuasaan Michel Foucault menawarkan kerangka analisis yang relevan untuk memahami fenomena tersebut. Foucault memandang kekuasaan bukan sekadar alat represif yang dimiliki oleh penguasa, melainkan jaringan relasi yang tersebar dalam berbagai institusi sosial dan bekerja melalui produksi pengetahuan serta pembentukan wacana. Dalam konteks kerajaan Islam di Nusantara teori ini memungkinkan analisis terhadap bagaimana kerajaan, ulama, lembaga pendidikan, dan sistem hukum berperan dalam membentuk praktik keislaman masyarakat (Foucault 1980).

Penelitian terdahulu telah banyak membahas proses Islamisasi di Nusantara. Pertama penelitian Intan Permatasari dan Hudaidah berjudul *Proses Islamisasi dan Penyebaran Islam di Nusantara* menjelaskan berbagai teori masuknya Islam ke Indonesia serta jalur-jalur penyebarannya, seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan politik. Penelitian tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai proses Islamisasi, tetapi belum secara khusus mengkaji hubungan antara penyebaran Islam dan praktik kekuasaan kerajaan (Permatasari and Hudaidah 2021). Kedua adalah penelitian Anisa Yusilafita dan tim menyoroti dinamika penyebaran Islam di Nusantara melalui pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Islamisasi dipengaruhi oleh kemampuan Islam beradaptasi dengan budaya lokal. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada faktor-faktor penyebaran Islam dan belum mengulas bagaimana relasi kuasa berperan dalam membentuk penerimaan masyarakat terhadap Islam (Anisa, Efendi, and Alimni 2023). Ketiga penelitian oleh Aufa Fatchia Rahma dan rekan-rekannya mengenai peran kerajaan Islam dalam proses Islamisasi Nusantara menegaskan bahwa kerajaan memiliki kontribusi besar dalam memperluas pengaruh Islam melalui kebijakan politik, pendidikan, dan dukungan terhadap aktivitas keagamaan. Penelitian ini telah menyinggung aspek kekuasaan, namun belum menggunakan teori sosial tertentu untuk menjelaskan mekanisme kerja kekuasaan tersebut secara mendalam (Rahma, Balkis, and Ratnasari 2026). Yang keempat penelitian Syahirul Alim mengenai pendekatan sufistik dalam Islamisasi Nusantara menunjukkan bahwa tasawuf menjadi sarana efektif dalam proses dakwah karena mampu mengakomodasi budaya lokal. Kajian ini berhasil menjelaskan aspek kultural Islamisasi, tetapi belum membahas bagaimana institusi politik kerajaan turut mendukung penyebaran dan penguatan wacana Islam di masyarakat (Syahirul 2024).

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu tersebut terlihat bahwa kajian mengenai Islam pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara masih didominasi oleh pembahasan tentang proses Islamisasi, perdagangan, dan akulturasi budaya. Adapun kajian yang secara khusus menganalisis perkembangan Islam melalui perspektif teori kekuasaan Michel Foucault masih relatif terbatas. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana relasi kuasa antara penguasa, ulama, institusi keagamaan, dan masyarakat berkontribusi dalam pembentukan serta penguatan Islam pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berupa fenomena historis mengenai perkembangan Islam pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara yang dianalisis melalui perspektif teori kekuasaan Michel Foucault. Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya Michel Foucault, terutama *Power/Knowledge* dan *Discipline and Punish*, serta literatur sejarah yang membahas perkembangan Islam dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Adapun sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen akademik yang relevan dengan tema Islamisasi, kerajaan Islam, dan relasi agama-kekuasaan (Creswell 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti proses Islamisasi, peran kerajaan, otoritas ulama, institusi keagamaan, dan praktik-praktik kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat kerajaan. Analisis data dilakukan menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) yang dipadukan dengan pendekatan interpretatif. Pada tahap ini data-data historis mengenai perkembangan Islam pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara dibaca dan diinterpretasikan melalui konsep-konsep utama Michel Foucault, seperti relasi kuasa (*power relations*), pengetahuan (*knowledge*), wacana (*discourse*), dan institusi. Melalui kerangka tersebut penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana kekuasaan bekerja melalui kerajaan, ulama, lembaga pendidikan, dan hukum Islam dalam membentuk serta mempertahankan dominasi wacana keislaman di Nusantara (Sugiyono 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Islam dan Produksi Wacana Kekuasaan di Kerajaan-Kerajaan Nusantara

Dalam perspektif Michel Foucault kekuasaan tidak hanya bekerja melalui dominasi politik atau penggunaan kekuatan fisik, tetapi melalui produksi pengetahuan dan pembentukan wacana yang menentukan apa yang dianggap benar oleh masyarakat. Kekuasaan dan pengetahuan (*power/knowledge*) membentuk hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Pengetahuan yang diproduksi oleh suatu institusi akan memperoleh legitimasi melalui kekuasaan, sedangkan kekuasaan memperoleh keberlanjutannya melalui pengetahuan yang dianggap sah oleh masyarakat (Foucault 1980). Jika perspektif tersebut diterapkan pada perkembangan Islam di Nusantara, maka kerajaan-kerajaan Islam dapat dipahami sebagai pusat produksi wacana keislaman. Islam tidak hanya berkembang melalui aktivitas perdagangan dan dakwah, tetapi juga melalui institusi politik yang memiliki kemampuan untuk mengatur norma sosial, membentuk identitas kolektif, serta menentukan bentuk pengetahuan keagamaan yang dianggap benar. Maka proses Islamisasi tidak hanya berlangsung pada level keyakinan individual, melainkan juga pada level pembentukan struktur sosial dan budaya (Kebung 2018).

Kesultanan Perlak yang berkembang sejak abad ke-9 M sering disebut sebagai salah satu kerajaan Islam paling awal di Nusantara. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan Selat Malaka memungkinkan terjadinya interaksi intensif antara masyarakat lokal dengan para pedagang dan ulama Muslim dari Arab, Persia, dan India. Tetapi lebih penting kerajaan ini menjadi ruang institusional pertama yang memberikan legitimasi politik terhadap ajaran Islam. Dukungan penguasa terhadap aktivitas pendidikan dan dakwah menjadikan Islam tidak lagi sekadar agama para pedagang asing, tetapi berkembang menjadi sistem pengetahuan yang memperoleh

pengakuan sosial di tengah masyarakat (Girsang et al. 2026). Peran yang lebih besar terlihat pada Kesultanan Samudera Pasai pada abad ke-13. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Pasai tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan internasional, tetapi juga sebagai pusat studi Islam dan jaringan intelektual Muslim di kawasan Asia Tenggara. Otoritas politik sultan memungkinkan terbentuknya lembaga-lembaga keagamaan yang memproduksi dan menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat luas. Dalam kerangka Foucauldian kondisi ini menunjukkan bahwa kerajaan berfungsi sebagai institusi yang memproduksi "rezim kebenaran" (*regime of truth*), yaitu seperangkat nilai, norma, dan pengetahuan yang diterima sebagai kebenaran dalam masyarakat (Larasati et al. 2026). Kedudukan Samudera Pasai sebagai pusat keilmuan Islam juga melahirkan jaringan ulama yang kemudian menyebarkan Islam ke berbagai wilayah Nusantara. Bahasa Melayu yang digunakan dalam administrasi kerajaan dan aktivitas dakwah secara bertahap berkembang menjadi media penyebaran pengetahuan Islam. Akibatnya Islam tidak hanya hadir sebagai agama baru, tetapi juga sebagai sistem pengetahuan yang membentuk cara masyarakat memahami dunia sosial dan religiusnya (Meurandeh 2022). Fenomena serupa dapat ditemukan pada Kesultanan Aceh Darussalam yang mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda (1607–1636). Pada masa ini kerajaan secara aktif mendukung perkembangan intelektual Islam melalui kehadiran ulama besar seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani, Nuruddin al-Raniri, dan Abdurrauf al-Singkili. Dukungan politik terhadap aktivitas keilmuan tersebut menunjukkan bahwa kerajaan tidak hanya mengelola wilayah kekuasaan tetapi juga mengelola produksi pengetahuan keagamaan. Dalam perspektif Foucault, pengetahuan yang dihasilkan para ulama memperoleh otoritas karena didukung oleh struktur kekuasaan kerajaan, sementara kerajaan memperoleh legitimasi melalui otoritas keagamaan yang dimiliki para ulama (Azra 2013).

Di Pulau Jawa Kesultanan Demak memperlihatkan hubungan yang serupa antara kekuasaan dan produksi wacana Islam. Berdirinya Demak tidak hanya menandai lahirnya kekuatan politik Islam pasca-kemunduran Majapahit, tetapi juga menjadi momentum terbentuknya identitas keislaman baru di Jawa. Melalui jaringan Walisongo, pembangunan masjid, pendidikan pesantren, serta penggunaan simbol-simbol Islam dalam pemerintahan, Demak berhasil membentuk wacana baru mengenai legitimasi politik yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Sehingga kekuasaan tidak bekerja melalui paksaan, melainkan melalui penerimaan masyarakat terhadap pengetahuan dan simbol-simbol keagamaan yang diproduksi oleh kerajaan dan para ulama (Ashif Fuadi 2021). Hal yang sama terlihat pada Kesultanan Banten, Cirebon, Ternate, Tidore, dan Gowa-Tallo. Kerajaan-kerajaan tersebut tidak hanya menjadi pusat kekuasaan politik, tetapi juga pusat pendidikan, perdagangan, dan penyebaran Islam. Melalui pembangunan masjid, lembaga pendidikan, jaringan ulama, serta penerapan norma-norma keagamaan dalam kehidupan sosial, kerajaan menghasilkan ruang-ruang sosial yang memungkinkan Islam menjadi identitas dominan masyarakat. Dalam istilah Foucault proses tersebut menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja secara produktif melalui institusi dan praktik sosial sehari-hari (Yusuf 2016).

Perkembangan Islam pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara tidak dapat dipahami hanya sebagai hasil aktivitas dakwah para ulama atau interaksi perdagangan semata. Kerajaan berperan sebagai produsen wacana keislaman yang menghubungkan kekuasaan politik dengan pengetahuan keagamaan. Melalui relasi tersebut Islam berkembang menjadi norma sosial yang diterima luas oleh masyarakat dan membentuk identitas kolektif berbagai komunitas di Nusantara. Perspektif Michel Foucault memperlihatkan bahwa keberhasilan Islamisasi bukan semata-mata akibat penyebaran ajaran agama, tetapi juga karena keberhasilan institusi kerajaan dalam memproduksi,

mendistribusikan, dan melegitimasi pengetahuan keislaman sebagai kebenaran sosial yang dominan (Soetomo 2024).

2. Relasi Sultan dan Ulama sebagai Jaringan Kekuasaan

Dalam perspektif Michel Foucault kekuasaan tidak bersifat terpusat pada satu aktor tunggal, melainkan tersebar dalam jaringan relasi sosial yang melibatkan institusi, individu, dan pengetahuan. Relasi antara sultan dan ulama dalam kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dapat dipahami sebagai bentuk jaringan kekuasaan yang saling menguatkan (*power network*), di mana agama dan politik tidak berdiri terpisah, tetapi saling memproduksi legitimasi (Foucault 1980). Kajian-kajian kontemporer menunjukkan bahwa ulama dalam struktur kerajaan Islam tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai aktor politik yang memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan. Aceh Darussalam misalnya, ulama dayah memiliki posisi strategis dalam struktur kekuasaan, bahkan mampu memengaruhi keputusan politik dan arah kebijakan kerajaan. Relasi ini menunjukkan adanya integrasi antara otoritas keagamaan dan kekuasaan politik dalam satu sistem sosial yang saling bergantung (Muntasir et al. 2025). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian mengenai Aceh yang menunjukkan bahwa ulama memiliki “visible and invisible power” melalui lembaga dayah dan jaringan keilmuan, sehingga mampu memengaruhi struktur politik dari tingkat lokal hingga regional. Dalam kerangka Foucauldian kondisi ini memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui institusi formal kerajaan, tetapi juga melalui otoritas simbolik dan keagamaan yang diakui masyarakat (Susanti and Rohwati 2025).

Kesultanan Samudera Pasai memiliki relasi antara sultan dan ulama yang telah membentuk fondasi awal jaringan keilmuan Islam di Nusantara. Kerajaan ini berperan sebagai simpul awal dalam jaringan intelektual Islam yang menghubungkan dunia Melayu dengan Timur Tengah. Ulama yang datang dari luar wilayah Nusantara tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga membentuk struktur pengetahuan yang dilegitimasi oleh kekuasaan politik kerajaan. Sehingga kerajaan berfungsi sebagai ruang produksi wacana keagamaan yang sah secara sosial (Susmihara 2018). Fenomena serupa juga tampak dalam Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16 hingga ke-17. Pada masa ini, Aceh menjadi pusat intelektual Islam internasional yang terhubung dengan jaringan ulama Timur Tengah. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Aceh dan Turki Utsmani tidak hanya bersifat diplomatik, tetapi juga berimplikasi pada penguatan sistem pendidikan dan hukum Islam di Nusantara (Firnanda and Imawan 2025). Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa antara sultan dan ulama tidak bersifat lokal semata, tetapi juga terhubung dengan jaringan Islam global.

Adapun di era Kesultanan Demak relasi antara Walisongo dan penguasa menunjukkan bentuk lain dari jaringan kekuasaan yang bersifat kultural-religius. Para wali tidak hanya menyebarkan Islam melalui dakwah, tetapi juga membentuk struktur legitimasi politik baru yang menggantikan kekuasaan Hindu-Buddha. Studi menunjukkan bahwa proses Islamisasi di Jawa tidak dapat dipisahkan dari pembentukan jaringan sosial antara ulama, pedagang, dan penguasa lokal yang saling memperkuat posisi Islam sebagai identitas dominan masyarakat (Ashif Fuadi 2021). Sementara pada masa Kesultanan Mataram Islam, relasi ulama dan sultan mengalami transformasi dari hubungan yang relatif sejajar menjadi lebih hierarkis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa terjadi pergeseran posisi ulama di mana sebagian ulama diintegrasikan ke dalam struktur birokrasi kerajaan dan berada di bawah otoritas sultan. Proses ini menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui institusionalisasi pengetahuan agama ke dalam struktur negara (Muhammad Ilham Aziz and Isna Zakiya Nurul Muftaza 2025). Dalam perspektif Foucault

transformasi tersebut mencerminkan mekanisme *governmentality*, yaitu cara kekuasaan bekerja melalui pengaturan populasi, institusi, dan pengetahuan untuk menciptakan keteraturan sosial. Sultan tidak hanya memerintah melalui hukum, tetapi juga melalui kontrol terhadap produksi pengetahuan keagamaan yang disebarkan oleh ulama. Di Kesultanan Banten relasi kuasa antara sultan dan ulama juga terlihat melalui penguatan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan masjid. Ulama berperan sebagai agen transmisi pengetahuan yang sekaligus memperkuat legitimasi moral kerajaan. Dengan dukungan kerajaan, jaringan ulama Banten berkembang hingga ke Makkah dan Madinah, sehingga memperluas pengaruh politik dan keagamaan kesultanan di tingkat internasional (Siti Nur Atika et al. 2025).

Berdasarkan berbagai contoh tersebut dapat dipahami bahwa relasi antara sultan dan ulama dalam kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara bukan sekadar hubungan administratif atau spiritual, tetapi merupakan jaringan kekuasaan yang kompleks. Kekuasaan bekerja melalui produksi pengetahuan keagamaan, legitimasi simbolik, serta institusi sosial yang membentuk cara masyarakat memahami otoritas. Dalam istilah Foucault relasi ini menghasilkan *regime of truth*, yaitu sistem kebenaran yang diterima secara sosial karena didukung oleh jaringan kekuasaan dan pengetahuan yang saling terkait (Soetomo 2024). Sehingga relasi sultan dan ulama merupakan elemen kunci dalam memahami keberhasilan Islamisasi di Nusantara. Islam tidak berkembang hanya melalui dakwah individual tetapi melalui jaringan kekuasaan yang menghubungkan negara, ulama, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam satu sistem produksi wacana keislaman yang berkelanjutan.

3. Institusi Keagamaan sebagai Mekanisme Disiplin Sosial

Dalam perspektif Michel Foucault kekuasaan modern tidak hanya bekerja melalui represi atau paksaan langsung, tetapi melalui mekanisme disiplin yang mengatur tubuh, perilaku, dan cara berpikir individu dalam kehidupan sosial. Kekuasaan disiplin ini bekerja secara halus melalui institusi seperti sekolah, penjara, rumah sakit, dan juga lembaga keagamaan, yang membentuk apa yang disebut Foucault sebagai *disciplinary power*. Dalam konteks kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, surau, dan lembaga peradilan Islam berfungsi sebagai ruang utama produksi sekaligus internalisasi disiplin sosial berbasis nilai-nilai Islam (Foucault 1995). Dalam historis Islam Nusantara institusi masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembentukan norma sosial. Di berbagai kerajaan seperti Demak, Aceh, Banten, dan Mataram Islam, masjid menjadi pusat aktivitas pendidikan, musyawarah, serta pengambilan keputusan sosial-politik. Hal ini menunjukkan bahwa masjid berperan sebagai ruang disiplin yang mengatur ritme kehidupan masyarakat, mulai dari ibadah harian hingga etika sosial. Dengan demikian, praktik keagamaan tidak hanya bersifat individual, tetapi menjadi bagian dari struktur pengawasan sosial yang terinstitusionalisasi (Azra 2013). Pesantren dan surau sebagai institusi pendidikan Islam juga memainkan peran penting dalam mekanisme disiplin sosial. Dalam banyak penelitian pesantren pada masa kerajaan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk pola hidup santri melalui aturan ketat mengenai ibadah, adab, dan relasi sosial. Sistem pendidikan ini menciptakan individu yang terbiasa dengan struktur hierarkis antara guru (kyai) dan murid, yang dalam perspektif Foucault dapat dipahami sebagai bentuk internalisasi kekuasaan melalui proses pembiasaan (*habituation*) dan pengawasan terus-menerus (*surveillance*) (Dhofier 2018).

Di Kesultanan Aceh Darussalam institusi pendidikan seperti dayah berkembang menjadi pusat disiplin keagamaan sekaligus pusat produksi pengetahuan Islam. Penelitian menunjukkan bahwa dayah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai institusi yang

membentuk moralitas sosial masyarakat Aceh. Para ulama dayah memiliki otoritas untuk menentukan standar benar dan salah dalam kehidupan keagamaan, sehingga peran mereka tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga normatif. Dalam kerangka Foucauldian kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja melalui produksi kebenaran yang kemudian diinternalisasi oleh masyarakat sebagai norma sosial (Sholikhin 2019). Fenomena serupa juga terlihat dalam Kesultanan Demak dan Banten, di mana pesantren menjadi instrumen penting dalam proses Islamisasi sekaligus pembentukan disiplin sosial. Melalui sistem pendidikan berbasis kyai, masyarakat dibentuk untuk mengikuti struktur moral Islam yang terorganisasi. Disiplin ini tidak hanya mencakup aspek ibadah, tetapi juga mencakup tata krama sosial, hukum keluarga, hingga hubungan ekonomi. Sehingga pesantren menjadi ruang produksi subjek Muslim yang sesuai dengan norma-norma yang dilegitimasi oleh kekuasaan kerajaan.

Lembaga peradilan Islam (*qadhi* atau pengadilan syariah) juga memainkan peran penting dalam mekanisme disiplin sosial di kerajaan-kerajaan Nusantara. Sistem hukum Islam yang diterapkan oleh kerajaan berfungsi sebagai bentuk regulasi perilaku masyarakat melalui mekanisme hukum yang dianggap sah secara religius. Dalam perspektif Foucault hukum bukan hanya alat represif, tetapi juga sarana produksi subjek yang patuh terhadap norma. Dengan adanya lembaga peradilan Islam, masyarakat tidak hanya takut terhadap hukuman, tetapi juga menginternalisasi norma hukum sebagai bagian dari identitas keagamaan mereka. Pada masa Kesultanan Mataram Islam mekanisme disiplin sosial semakin terintegrasi melalui sentralisasi kekuasaan politik dan religius. Sultan tidak hanya berperan sebagai penguasa politik, tetapi juga sebagai simbol otoritas moral dan spiritual. Ritual-ritual keagamaan yang melibatkan kerajaan, seperti perayaan hari besar Islam dan tradisi kejawen-Islam, menjadi sarana pembentukan kesadaran kolektif masyarakat. Dalam perspektif Foucault, hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja melalui ritualisasi kehidupan sosial yang mengatur tubuh dan perilaku masyarakat secara sistematis (Muhammad Ilham Aziz and Isna Zakiya Nurul Muftaza 2025)

Institusi keagamaan di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara juga berfungsi sebagai bentuk *panopticism* sosial, yaitu mekanisme pengawasan yang membuat individu merasa selalu diawasi meskipun tidak ada pengawas secara langsung. Ulama, kyai, dan aparat keagamaan berperan sebagai agen pengawasan simbolik yang memastikan bahwa norma-norma Islam dipatuhi oleh masyarakat. Kesadaran akan adanya pengawasan ini mendorong internalisasi nilai-nilai agama secara sukarela, sehingga kekuasaan menjadi lebih efektif tanpa harus menggunakan kekerasan fisik (Soetomo 2024). Sehingga institusi keagamaan dalam kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara tidak hanya berfungsi sebagai sarana spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme disiplin sosial yang membentuk perilaku, identitas, dan kesadaran masyarakat. Melalui masjid, pesantren, dayah, surau, dan lembaga peradilan Islam, kekuasaan bekerja secara produktif dalam membentuk “subjek Muslim” yang sesuai dengan norma yang dilegitimasi oleh kerajaan. Dalam kerangka Michel Foucault, proses ini menunjukkan bahwa Islamisasi tidak hanya merupakan proses penyebaran agama, tetapi juga proses disiplin sosial yang kompleks melalui jaringan institusi keagamaan yang terintegrasi dengan kekuasaan politik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis menggunakan perspektif teori kekuasaan Michel Foucault, perkembangan Islam pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara menunjukkan bahwa proses Islamisasi tidak hanya berlangsung sebagai penyebaran ajaran agama, tetapi juga sebagai proses pembentukan dan pengelolaan kekuasaan melalui pengetahuan, institusi, dan relasi sosial. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Banten, dan Mataram

Islam berperan sebagai pusat produksi wacana keislaman yang memberikan legitimasi terhadap nilai, norma, dan pengetahuan Islam dalam masyarakat. Relasi antara sultan dan ulama memperlihatkan adanya jaringan kekuasaan yang saling menguatkan. Sultan memperoleh legitimasi religius dari ulama, sementara ulama memperoleh dukungan politik dan institusional untuk menyebarkan ajaran Islam. Hubungan tersebut memungkinkan terbentuknya sistem pengetahuan keagamaan yang diterima sebagai kebenaran sosial dan menjadi dasar bagi legitimasi kekuasaan kerajaan.

Adapun institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, surau, dayah, dan lembaga peradilan Islam berfungsi sebagai mekanisme disiplin sosial yang membentuk perilaku, identitas, dan kesadaran masyarakat. Melalui institusi-institusi tersebut, nilai-nilai Islam diinternalisasikan secara berkelanjutan sehingga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Nusantara. Sehingga dalam perspektif Michel Foucault, keberhasilan Islamisasi pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara tidak dapat dijelaskan hanya melalui faktor dakwah, perdagangan, atau konversi keagamaan semata. Keberhasilan tersebut juga ditentukan oleh kemampuan kerajaan dalam memproduksi wacana keislaman, membangun jaringan kekuasaan antara penguasa dan ulama, serta mengembangkan institusi keagamaan yang berfungsi sebagai sarana pembentukan dan pengawasan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa agama dan kekuasaan merupakan dua unsur yang saling berinteraksi dalam membentuk perkembangan Islam di Nusantara.

Penelitian ini masih berfokus pada analisis konseptual mengenai perkembangan Islam pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara melalui perspektif teori kekuasaan Michel Foucault. Sehingga penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian yang lebih spesifik terhadap satu kerajaan tertentu, seperti Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Banten, atau Mataram Islam, dengan memanfaatkan sumber-sumber primer seperti naskah, arsip, kronik, dan manuskrip lokal. Adapun penggunaan pendekatan teoritis lain, seperti hegemoni Antonio Gramsci, otoritas kharismatik Max Weber, atau teori diskursus kontemporer, dapat dilakukan untuk memperkaya pemahaman mengenai relasi agama, kekuasaan, dan proses Islamisasi dalam sejarah Nusantara.

REFERENSI

- Abdullah, Taufik. 1987. *Islam Dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Anisa, Yusilafita, T. Efendi, and A. Alimni. 2023. *Proses Islamisasi Dan Penyebarannya Di Nusantara*. 7 (2). <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.6413>.
- Ashif Fuadi, Moh. 2021. "Islamization and the Transition of Power in Nusantara According to Kiai Abul Fadhol's Ahlā al-Musāmarah." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 16 (1): 80–104. <https://doi.org/10.15642/islamica.2021.16.1.80-104>.
- Azra, Azyumardi. 2013. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th Ed.* (California), 2014.
- Dhofier, Zamakhsyari. 2018. "Tradisi Pesantren Dan Pembentukan Otoritas Kiai." *Journal of Indonesian Islam*, ahead of print, 2018. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/JIIS.2018.12.1.1-22>.
- Firnanda, Rizky, and Dzulkifli Hadi Imawan. 2025. "RELASI POLITIK KERAJAAN ACEH DARUSSALAM DAN DAULAH TURKI UTHMANI DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI NUSANTARA." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4 (1): 177–89. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i1.829>.
- Foucault, Michel. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*, Ed. Colin Gordon. New York: Pantheon Books.
- . 1995. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage.
- Girsang, Elsha Putriany Br, Angel Sinambela, Fikri Maulana Saleh Harefa, Jeremy Arif Gonzales Tarigan, and Pristi Suhendro Lukitoyo. 2026. "PERAN STRATEGIS KESULTANAN PERLAK DALAM PROSES ISLAMISASI AWAL DI NUSANTARA." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.44102>.
- Kebung, Konrad. 2018. "Membaca 'Kuasai' Michel Foucault Dalam Konteks 'Kekuasaan' Di Indonesia." *MELINTAS* 33 (1): 34–51. <https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2953.34-51>.
- Larasati, Dinda Dewi, Agnes Secilia Simamora, Bella Sophia Sihotang, Eriva Tampubolon, Fikri Maulana Saleh Harefa, and Flores Tanjung. 2026. "KESULTANAN SAMUDERA PASAI SEBAGAI PUSAT AWAL ISLAMISASI DI NUSANTARA: ANTARA PERDAGANGAN DAN KEKUASAAN POLITIK." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11 (1). <https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.43282>.
- Meurandeh, Jalan. 2022. "KESULTANAN SAMUDRA PASAI DAN STRATEGINYA DALAM ISLAMISASI NUSANTARA." *Liwa'ul Dakwah* 12 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/liwa'uldakwah.v12i1.1237>.
- Muhammad Ilham Aziz and Isna Zakiya Nurul Muftaza. 2025. "PERUBAHAN RELASI KUASA ULAMA DAN SULTAN DI KERAJAAN MATARAM ISLAM 1613-1677." *JUSAN: Jurnal Sejarah Peradaban Islam Indonesia* 3 (1): 72–86. <https://doi.org/10.21154/jusan.v3i1.11148>.

- Muntasir, Muntasir, Iskandar Zulkarnaen, Muhammad Aminullah, Muslem Hamdani, and Bimby Hidayat. 2025. "Power Structures and Religious Legitimacy: The Influence of Dayah Ulama in the Politics of Aceh Analyzed Using Powercube Theory." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 13 (1): 437–62. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i1.1625>.
- Permatasari, Intan, and Hudaidah. 2021. *Proses Islamisasi Dan Penyebaran Islam Di Nusantara*. 8 (1). <https://doi.org/10.29408/jhm.v8i1.3406>.
- Rahma, Aufa Fatchia, Lutfiah Holifa Balkis, and Dwi Ratnasari. 2026. "The Role of Islamic Kingdoms in the Islamization of the Nusantara: A Literature Study of Samudera Pasai, Aceh, and Mataram." *Journal of Indonesian Islamic Studies* 5 (2): 87–94. <https://doi.org/10.24256/jiis.v5i2.10247>.
- Ricklefs. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi.
- Sholikhin, Muhammad. 2019. "Pesantren as Social Institution in Java." *Qudus International Journal of Islamic Studies*, ahead of print, 2019. <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/qijis.v7i1.4923>.
- Siti Nur Atika, Ishmatul Mawla, Siti Nurlatifah, Arizcha Marwatussoffah, Vera Oktaviani, and Faiz Fikri Alfahmi. 2025. "PERAN KESULTANAN BANTEN DALAM MEMPERTAHANKAN DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI ISLAM DI NUSANTARA." *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam* 4 (3): 671–89. <https://doi.org/10.51806/an-nahdlah.v4i3.645>.
- Soetomo, Greg. 2024. *Knowledge and Power in Islamic Historiography: A Dialectical Reading through the Lens of Michel Foucault*. 8 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30983/fuaduna.v8i2.9331>.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung), 2020.
- Susanti, Endang, and Siti Rohwati. 2025. "Negara, Ulama, dan Masyarakat: Relasi Kuasa dalam Produksi Otoritas Keagamaan di Indonesia Kontemporer." *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 9 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47313/jkik.v9i2.4355>.
- Susmihara. 2018. "Pendidikan Islam Masa Kerajaan Islam Di Nusantara." *Rihlah* 6 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/rihlah.v6i1.5454>.
- Syahirul, Alimm. 2024. *Islamisasi Di Nusantara: Pendekatan Sufistik Dalam Dakwah Islam*. 28 (2). <https://doi.org/10.15408/dakwah.v28i2.42864>.
- Yusuf, Choirul Fuad. 2016. "Kesultanan Nusantara Dan Faham Keagamaan Moderat Di Indonesia." *Jurnal Lektur Keagamaan* 14 (2): 457. <https://doi.org/10.31291/jlk.v14i2.508>.